**Analisis Putusan Hakim Kasasi Terhadap Tindak Pidana
Perbankan Pada Bank Riau Kepri Syariah**

**Oleh : Nadila
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.
Pembimbing II : Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Katio, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
Email : nadilajassra1611@gmail.com Telepon : 0812 7785 2201**

ABSTRACT

Analysis of the cassation judge's decision regarding Banking Crime with Case Number 2359 K/Pid.Sus/2022 starting from the District Court decision to the Cassation where the District Court decision took 2,6 years and was strengthened by the High Court decision and the Supreme Court gave a different decision, namely: acquittal. The Supreme Court judge who did not impose a sentence on a defendant who was proven to have committed a banking crime is an example of weak law enforcement by judges so that it does not reflect the meaning of justice and benefit.

This research aims to find out the basic considerations of the cassation judge in handing down a verdict of acquittal for banking crimes in Case Decision Number 2359 K/Pid.Sus/2022. Another aim is to find out whether the judge's decision to acquit the defendant is in accordance with the concept of the Banking Crimes Law. This research is a type of normative legal research, namely research on legal principles starting from certain legal principles, by first identifying the legal rules that have been formulated in legislation. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal sources that are relevant to the research topic and data collection techniques are carried out by means of literature review. The analytical tools used to answer the problems in this research are the theory of justice, the theory of relative punishment and the theory of legal responsibility.

*From the results of this research, it can be concluded that the basis for consideration of the Supreme Court Judge who examined and adjudicated gave a decision that was contrary to what had been decided in *judex facti* where the decision is given by the Supreme Court Judges acquittal on the basis that the charges demanded by the Public Prosecutor were not proven. The Supreme Judge in his ruling stated that this case was a criminal case of embezzlement. Then the acquittal decision given by the Supreme Judge in Case Number 2359 K/Pid.Sus/2022 did not fulfill the concepts and elements contained in article 49 paragraph (2) letters a and b of Law Number 10 of 1998 concerning Banking.*

The panel of judges at the District Court, High Court and Supreme Court levels must be equally able to provide decisions that are truly in accordance with the actions of the perpetrators of criminal acts. In the case of banking crimes, judges should understand and be careful about banking science so that the decision is in accordance with the objectives of the law itself, especially in banking law. The Supreme Court Judge as the final level court seeking justice in society should really pay attention and analyze, especially the fulfillment of the elements and concepts of criminal law regulations.

Keyword: -Banking Crime, -Acquittal, -Judex Juris

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan mengatur secara khusus segala bidang hukum termasuk di dalam ranah perbankan. Hukum perbankan mengalami perkembangan dengan adanya kondisi kejahatan dalam dunia perbankan.¹ Kejahatan dalam dunia banyak ditemui secara beragam dengan modus kejahatan yang baru, kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri dan kelompok secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak.²

Jurnal ini menganalisis suatu putusan pada tindak pidana perbankan (Tipibank) di Pekanbaru mulai dari putusan Pengadilan Negeri hingga kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memvonis bersalah Pimpinan Cabang (Pincab) PT. Bank Riau Kepri (BRK) selama 2,6 tahun penjara dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kasus tindak pidana perbankan ini menyangkut perkara *fee* asuransi PT. BRK yang mendakwa Pincab yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima imbalan berupa uang *fee* premi asuransi kredit dari PT. Global Risk Management (GRM) selaku pialang asuransi yang menjadi mitra PT. BRK.

Proses Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan amar menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya Jaksa mengajukan kasasi berisi bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) keberatan atas kewenangan *judex facti* dalam hal menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tipibank dengan pidana penjara yang

diputuskan *judex facti* oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Hakim Agung berdasarkan *judex juris* memberikan putusan berupa putusan bebas kepada Pincab, putusan ini beralasan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penggelapan uang dan Jaksa tidak mendakwakan pasal penggelapan tersebut.

Jaksa pada kasus ini menggunakan dakwaan alternatif dalam menilai pasal yang akan didakwakan. Kasus Pincab ini merupakan bukti bahwasannya penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hakim sangat tidak cermat dalam menilai unsur undang-undang tindak pidana perbankan sehingga berakibat bebasnya para tindak pidana tersebut.³ Jika dianalisa oleh peneliti, berdasarkan kronologi yang terjadi dimana telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Tipibank sebagai hukum yang bersifat khusus dan sudah seharusnya Hakim Mahkamah Agung tidak memberikan putusan bebas.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas penegakan hukum pidana terkhususnya terhadap Tipibank dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Kasasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Pada Bank Riau Kepri Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim kasasi dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbankan dalam Putusan Perkara Nomor 2359 K/Pid.Sus/2022?
2. Apakah putusan bebas yang diputuskan oleh Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan konsep Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan?

¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 139.

² Fatmah Paparang, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 9 Agustus 2016, hlm. 12.

³ Erna Ariyani, Mexsasai Indra, Davit Rahmadan, “Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.6 No. 2, 2021, hlm. 821.

⁴ <https://m.liputan6.com/regional/read/4601267/mengenal-modus-kejahatan-perbankan-ala-3-petinggi-bank-riau>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan Hakim kasasi dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbankan dalam Putusan Perkara Nomor 2359 K/Pid.Sus/2022.
- b) Untuk menemukan jawaban apakah putusan bebas yang diputuskan oleh Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan konsep Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana serta dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran.
- c) Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian serta sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi, masyarakat serta mahasiswa dalam hal perkembangan hukum pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi

hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak akan pantas menjadi hukum.⁵

2. Teori Pemidanaan Relatif

Menurut Leonard bahwa teori pemidanaan relatif bertujuan untuk mencegah dimana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan karena tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat.⁶

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."⁷ Lebih lanjut, Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*).⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁹

⁵ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012, hlm. 96.

⁷ La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020, hlm. 111-112.

⁸ Mira Indrawati, Abdul Manan, Dhoni Martien, "Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 6 (2021), hlm. 2099.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 54.

2. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁰
3. Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain yang bertujuan untuk membatalkan atau memecah perkara-perkara agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.¹¹
4. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang berdasarkan Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan.
5. Bank Riau Kepri Syariah adalah satu-satunya perbankan syariah daerah milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Kota Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan Diatas No.1 tanggal 2 Agustus 1961 dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-1-15 tanggal 12 Agustus 1961.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yang mengkaji terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2010, hlm. 127.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media Group, Depok, 2021, hlm. 94

perundang-undangan maupun putusan pengadilan. yang meliputi bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di perpustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Perbankan sebagai Tindak Pidana Kerah Putih (*White Collar Crimes*)

1. Perkembangan Kejahatan dan Hubungannya dengan Sistem Perbankan

Globalisasi dan liberalisasi mendorong tumbuhnya kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) termasuk kejahatan perbankan yang mana korban yang dihasilkan kejahatan perbankan ini lebih berbahaya dibandingkan tindak pidana atau

kejahatan konvensional seperti perampokan, penipuan, pemerasan dan pencurian biasa.¹⁶

2. Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Kerah Putih (*White Collar Crimes*)

Tindak pidana kerah putih (*white collar crimes*) merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan atas serta berkedudukan sosial tinggi dan dilakukan dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*) yang mana berupa penipuan canggih yang dilakukan para eksekutif senior (*the sophisticated Frauds of senior executives*).¹⁷

3. Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Kerah Putih (*White Collar Crimes*)

Dimensi baru kejahatan dalam konteks kejahatan baru bahwa gejala kriminalitas dari perkembangan ekonomi dan pembangunan seperti pelanggaran hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, penyelundupan, kejahatan perbankan, kejahatan komputer yang pelakunya berbentuk badan hukum (korporasi) atau pengusaha-pengusaha yang memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat dan tidak menggunakan kekerasan fisik seperti merampok tetapi lebih sering dilakukan berkedok *legitimate economic activities* (kegiatan ekonomi yang sah).¹⁸

4. Pengertian Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

¹⁶ Christian Henry Ratulangi, dkk, "Tindak Pidana Cyber Crime dalam Kegiatan Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 5 April 2021, hlm. 179.

¹⁷ <http://www.criticim.org/redfeather/crime/005scorporate.html> diakses pada 07 September 2023.

¹⁸ Yan Patmos, "Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No. 2 Desember 2017, hlm. 117.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau orang bank yang terdiri dari pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank pemegang saham bank yang pengaturannya tercantum dalam undang-undang perbankan yang dilakukan dengan sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan sehingga menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah dan pihak ketiga.

Tindak pidana perbankan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mana tindak pidana perbankan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana dan tindak pidana perbankan ini hanya terbatas kepada yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan.¹⁹

B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank, Sikap maupun Tindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, serta Pemegang Saham Bank

1. Definisi Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank, Sikap dan Tindakan yang Dilakukan Subjek Hukum Perbankan (Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank)

Pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dan pemegang saham bank menjalani tugas

dan kewajibannya dengan tanggung jawab penuh dan semua tindakan yang dilakukannya harus didasarkan prinsip kehati-hatian karena prinsip kehati-hatian ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah dilakukannya suatu tindak pidana ataupun penyelewengan dana. Maka daripada itu setiap pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dan para pemegang saham bank wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank.²⁰

2. Jenis Tindak Pidana Perbankan

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa jenis yaitu:²¹

- a) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
- b) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
- c) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan
- d) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,

¹⁹ Justisi Devli Wagiu dan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*, Nasmedia, Makassar, 2022, hlm. 56.

²⁰ Karimah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan dalam Transaksi Perbankan*, Guepedia, Jakarta, 2020, hlm. 76.

²¹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 24.

uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya²²

- e) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank
- f) Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
- g) Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

Unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank sebagai berikut:²³

- a) Pasal 49 ayat (1) huruf a tentang Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
- b) Unsur dengan sengaja berarti menghendaki harus melakukan tindakannya membuat atau menyebabkan adanya pencatatan

palsu dengan diliputi oleh kesengajaan.²⁴

- c) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
- d) Pasal 49 ayat (1) huruf b tentang menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan
- e) Pasal 49 ayat (1) huruf c tentang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan
- f) Pasal 49 ayat (2) huruf a tentang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya
- g) Pasal 49 ayat (2) huruf b tentang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
- h) Pasal 50 tentang menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

4. Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

Unsur penting yang harus dipertimbangkan adalah unsur kesengajaan yang mana jika unsur kesengajaan dipenuhi maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika keseluruhan ini terjadi maka secara tidak langsung setiap pegawai bank akan berusaha maksimal

²² M. Irsan Nasution, "Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya dengan Tindak Pidana Perbankan", *Adliya*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm 320.

²³ Khalimi Kodrat Alam, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Tustitia*, Vol. 8, No. 1 April 2022, hlm. 31.

²⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 317.

dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga akan terhindar dari resiko hukum bila terjadi pelanggaran sistem prosedur.²⁵

5. Sanksi Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank, Sikap maupun Tindakan yang dilakukan Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

- a) Pasal 41 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- b) Pasal 49 ayat (1) huruf b diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- c) Pasal 49 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- d) Pasal 49 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)²⁶

- e) Sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- f) Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah yang diperlukan diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dengan denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- g) Pasal 50A diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).²⁷

C. Dasar Pertimbangan Hakim Agung dalam Membuat Putusan Perkara Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Sikap dan Tindakan yang dilakukan Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

1. Hal Ikhwal tentang Putusan

- a) Rumusan dan peristilahan putusan Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim

²⁵ M. Rizal Situru, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank yang Melanggar Sistem Prosedur dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Bidang Perbankan", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 Maret-Juni 2014, hlm. 515.

²⁶ *Ibid*, hlm. 516.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hlm. 6-8.

sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak bukan hanya yang diucapkan saja melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ucapan oleh Hakim di muka sidang.

b) Bentuk-bentuk putusan

Bentuk perkara menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam putusan, yaitu putusan pemidanaan; putusan bebas; putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum; putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili; putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.²⁸

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim yaitu raw input; instrumental input; environmental input.²⁹

2. Karakteristik Putusan Kasasi

Pengertian putusan kasasi berarti memecah, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Mahkamah Agung *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.

3. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Pertimbangan hukum dalam putusan sangatlah penting dipandang cukup jika memenuhi syarat yaitu³⁰

hukum formil dan hukum materil; pertimbangan demi mewujudkan keadilan; Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

D. Budaya Hukum Hakim, Hermeneutika Hukum dan Hukum Progresif

1. Budaya Hukum Hakim

a) Konsep budaya, budaya hukum, dan budaya hukum hakim

Budaya sebagai sistem lambang ini terkait kegiatan cipta, rasa, dan karsa manusia sehingga dipahami sebagai pengetahuan (*system of meaning*) melahirkan ide-ide kognitif dan sistem nilai (*system of value*) melahirkan ide-ide normatif.³¹ Budaya hukum Hakim yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas Hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan.³²

b) Hukum dan nilai-nilai sosial budaya

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

c) Peranan budaya hukum dalam konteks penegakan hukum

Unsur terpenting dalam penegakan hukum yaitu manusia dan lingkungan sosial yang mana seorang penegak hukum cenderung menjalankan fungsinya.³³

2. Hermeneutika Hukum

Hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi

²⁸ Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 112.

²⁹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 105

³⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, dkk, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan

Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 Oktober 2021, hlm. 484.

³¹ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 63.

³² Sa'adah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Budaya Hukum", *At-Taradhi*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 3.

³³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Depok, 2021, hlm. 105.

ketidaktahuan menjadi mengerti seperti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata dan bertindak sebagai penafsiran yaitu ungkapan pikiran yang kurang jelas menjadi jelas. Hermeneutika atau penafsiran adalah ciri khas manusia karena manusia mampu memberikan makna kepada realitas.³⁴

3. Hukum Progresif

Hukum progresif lahir atau dengan sebutan lain yaitu ilmu hukum progresif (IHP) didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia. Ilmu hukum progresif sangat memperdulikan faktor perilaku yaitu logika peraturan yang disempurnakan dengan logika pengalaman. Pandangan seorang Hakim tentang hukum dan fungsi hukum, maka putusan Hakim yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat.³⁵

Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk, mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menentukan keadilan, hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam memaknai hukum karena mereka yang menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif dan dari merekalah diharapkan lahirnya keputusan yang berkualitas “yurisprudensial” (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif.³⁶

³⁴ Isharyanto dan Aryoko Andurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 23.

³⁵ Yordan Elang Mulya Lesmana, “Modalitas Hakim Progresif”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2020, hlm. 239.

³⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 280.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Perbankan Pada Putusan Perkara Nomor 2359 K/Pid.Sus/2022

Hakim Agung memberikan pertimbangan bahwa atas dasar PT. BPD Riau menerima *fee based* bank berdasarkan amanat Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 33/SE.OJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK-03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pertimbangan selanjutnya berdasarkan 2 (dua) amanat Surat Edaran OJK kemudian dirumuskan dalam peraturan internal PT. BPD Riau Kepri yaitu Surat Kesepakatan Direksi PT. BPD Riau Kepri Nomor 096 A/Kepdir/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan pialang asuransi untuk mengelola asuransi kredit berdasarkan consumer PT. Bank Riau Kepri.

Perbuatan terdakwa menerima 10% diluar ketentuan *fee based* Bank sudah jelas telah melanggar SEOJK sebagai ketentuan Eksternal maupun Surat Keputusan Direksi PT. BPD Bank Riau Kepri sebagai ketentuan internal yang mana dengan sepengetahuan terdakwa. ahwa ada ketentuan *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan) di PT. BPD Bank Riau Kepri yang harus dipatuhi serta dengan adanya Surat Pernyataan Kepatuhan yang telah ditandatangani dengan melarangnya melakukan penerimaan imbalan berupa uang dari pihak lain dalam lingkup pelaksanaan tugasnya dan hal ini diketahui terdakwa tetapi terdakwa tetap menerimanya.

Tetapi Hakim Agung berpendapat perbuatan *a quo* Terdakwa menerima *fee* 10 (sepuluh) persen tidak bertentangan

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. BPD Riau Kepri. Analisa peneliti terkait bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan secara nyata terdakwa menggunakan kekuasaan jabatannya selaku Pincab untuk mendapatkan keuntungan pribadinya yang mana memenuhi unsur tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga menurut peneliti dasar pertimbangan Hakim Agung keliru.

Hakim Agung mendasari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan JPU tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan analisa peneliti terkait unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah terpenuhi dengan dasar adanya perbuatan sengaja yang dilakukan oleh Pincab BRK dengan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan Pihak Broker lainnya, Nasabah, dan PT. BRK.

Hakim Agung dalam pertimbangannya juga berpendapat Terdakwa telah melakukan penggelapan uang *fee* sebesar Rp. 119.879.875 yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu untuk kepentingan pengelolaan Bank namun Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.³⁷

Sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim Agung tersebut terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menggelapkan dana PT. BPD Riau Kepri karena JPU tidak mendakwanya, menurut peneliti unsur-unsur undang-undang tindak pidana perbankan dan dasar

hukum peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta di persidangan bahwa perkara dengan Nomor 2359 K/Pid.Sus/2022 ini merupakan suatu tindak pidana perbankan.

Dalam mengadili sendiri Mahkamah Agung menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”, maka perlu ada penegasan jika Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan mewajibkan mengadili sendiri di tingkat kasasi dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.³⁸

Kasus ini membuktikan bahwasannya lemahnya penegakan hukum pidana terkhususnya di ranah tindak pidana perbankan. Berdasarkan putusan Hakim Agung pada kasus tindak pidana perbankan ini yang menyatakan bahwasannya kasus ini bukan merupakan suatu tindak pidana perbankan tetapi merupakan Tindak Pidana Penggelapan yang berakibat hukum kepada terdakwa dengan dasar tidak adanya dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan sehingga terdakwa selaku pelaku Tindak Pidana dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum dari putusan Mahkamah Agung sudah jelas bahwa kasus ini bukan kasus penggelapan uang yang dilakukan terdakwa dengan menggelapkan uang PT. BRK melainkan terdakwa dengan sengaja menerima, menyetujui menerima imbalan atas fasilitas kredit untuk kepentingan pribadinya dan hal ini merupakan unsur-unsur dari tindak pidana perbankan

³⁷ Sri Hajati Ellyne Dwi Poespari Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 228.

³⁸ Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 20.

sebagaimana bunyi Pasal 49 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Kesesuaian Penjatuhan Putusan Bebas Yang Diputuskan Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Dengan Konsep Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan

Pemikiran Hakim harus sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan yang terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada Majelis Hakim yang lain sebelum memutus suatu perkara.³⁹ Berdasarkan analisa peneliti terkait putusan Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana perbankan dengan Nomor 2359 K/Pid.Sus/2022 yang memberikan amar putusan pada intinya bahwa terdakwa dalam hal ini dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

Dikaitkan dengan konsep undang-undang tindak pidana perbankan itu sendiri terkhususnya yang dijelaskan dalam pasal Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang berbunyi: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:⁴⁰

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam

memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak R100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Berdasarkan bunyi pasal 49 ayat (2) huruf a dan b tersebut berikut Peneliti uraikan terkait konsep dan unsur-unsur dari tindak pidana perbankan:

1. Pasal 49 ayat (2) yang mana unsur bahwa dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja. Berdasarkan penjelasan ayat 2 tersebut dengan kasus tindak pidana perbankan ini sudah memenuhi salah satu unsur tindak pidana perbankan yakni Pincab merupakan pejabat sekaligus pegawai bank yang memenuhi unsur sengaja.
2. Pada Pasal 49 ayat (2) huruf a unsur selanjutnya pada pasal 49 undang-undang tindak pidana perbankan yakni unsur menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha

³⁹ Firstananda Probojati Hartito dan Bambang Santoso, "Kajian Terhadap Pembebasan Terdakwa Akibat Pengesampingan Alat Bukti Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015)", *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2019, hlm. 28-29.

⁴⁰ Dasrol, Hengki Firmanda, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.137.

mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit. Pada kasus Tipibank ini terkhususnya atas unsur pasal 49 ayat (2) huruf a sudah terpenuhi dimana Pincab selaku pejabat atau pegawai bank sudah melakukan tindak pidana perbankan berupa menerima imbalan uang tambahan untuk keuntungan pribadinya dengan cara memberikan fasilitas kredit sesuai dengan kronologis dan fakta di persidangan.

3. Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan atas ketaatan bank, maka pelaku diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun dengan denda lima miliar dan maksimal 100 miliar. Berdasarkan penjelasan ayat (2) huruf b sudah jelas Pincab melakukan atau tidak melaksanakan ketaatan bank dengan sengaja menerima uang untuk keuntungan pribadinya.

Berdasarkan konsep undang-undang tindak pidana perbankan serta unsur-unsur dari undang-undang tindak pidana perbankan itu yang dikaitkan dengan putusan bebas yang diberikan oleh Hakim Agung secara nyatanya merupakan putusan yang keliru. Peneliti telah menguraikan unsur-unsur dan konsep dari undang-undang tindak pidana perbankan pada kasus ini secara konsep dan pemenuhan unsur dari pasal 49 ayat (2) huruf a dan b tersebut sudah terpenuhi. Sehingga *judex juris* tidak berlandaskan *asas lex specialis derogat legi generali* yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Pada perkara nomor 2359 K/Pid.Sus/2022 seharusnya digunakan ketentuan khusus yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan karena dalam hal ini pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dan harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang tepat sebab perkara tersebut berkaitan dengan usaha bank dan mempunyai ketentuan khusus.

Hakim sebelum mengkaji nilai-nilai yang ada di masyarakat terlebih dahulu Hakim harus memastikan unsur-unsur atas kepastian dibalik aturan perundang-undangan.⁴¹ Putusan yang berkualitas harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat teoretis yaitu sudah sesuai dengan teori yang telah teruji kebenarannya karena suatu putusan dapat dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya dan syarat praktis yaitu telah sesuai dengan praktek dilapangan yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan berupa terselesaikan sengketa dengan tegaknya hukum dan rasa keadilan dan dapat dipraktekkan (dilaksanakan) sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan akhir berperkara suatu putusan dapat dianggap benar apabila sudah memenuhi kebutuhan praktis.

Kebiasaan yang dilakukan Pincab terhadap pelanggaran undang-undang perbankan tidak terjadi hanya pada seorang Pincab tetapi pada kasus ini juga melibatkan beberapa Pincab lainnya dan teregister pada nomor perkara persidangan yang berbeda. Seharusnya Hakim pada kasus ini memberikan putusan yang berkualitas dengan memutus berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan dengan sanksi penjara yang lebih diperberat dikarenakan kasus ini merupakan tindak pidana kerah putih dan juga sudah merupakan tindak pidana yang melibatkan terorganisirnya kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang Pincab dengan dibuktikan pada kasus ini yang terlibat ada beberapa Pincab.

⁴¹Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 296.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan yang bertentangan dengan yang telah diputus pada *judex facti* dimana putusan yang diberikan oleh Hakim Agung ialah putusan bebas dengan landasan bahwasannya tidak terbuktinya dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan kasus ini merupakan kasus Tindak Pidana Penggelapan
2. Bahwa putusan bebas yang diberikan oleh Hakim Agung pada Nomor Perkara 2359 K/Pid.Sus/2022 tidak memenuhi konsep dan unsur-unsur yang tertuang didalam pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Saran

1. Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung harus sama-sama mampu memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam hal Tindak Pidana Perbankan Hakim seharusnya paham dan cermat terhadap ilmu perbankan sehingga putusan tersebut sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri terkhususnya dalam hukum perbankan.
2. Hakim Agung sebagai pengadilan tingkat akhir untuk mencari keadilan di masyarakat seharusnya benar-benar mencermati dan menganalisa terkhususnya atas pemenuhan unsur dan konsep dari aturan tindak pidana Perbankan dan Penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.

- Dasrol, Hengki Firmada, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media Group, Depok, 2021.
- Faiki, La Ode, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Karimah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan dalam Transaksi Perbankan*, Guepedia, Jakarta, 2020.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Moechthar, Sri Hajati Ellyne Dwi Poespasari Oemar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2010.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2018.
- _____, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Depok, 2021.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Wagiu, Justisi Devli dan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*, Nasmedia, Makassar, 2022.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Alam, Khalimi Kodrat, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Jurnal Tustitia*, Vol. 8, No. 1 April 2022.

Ariyani, Erna, Mexsasai Indra, Davit Rahman, “Analisis Hukum Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.6 No. 2, 2021.

Hartito, Firstananda Probojati dan Bambang Santoso, “Kajian Terhadap Pembebasan Terdakwa Akibat Pengesampingan Alat Bukti Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015)”, *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2019.

Indrawati, Mira, Abdul Manan, Dhoni Martien, “Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran *Fiduciary Duty* Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 6 (2021).

Nasution, M. Irsan, “Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Adliya*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015.

Paparang, Fatmah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 9 Agustus 2016.

Patmos, Yan, “Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No. 2 Desember 2017.

Ratulangi, Christian Henry, dkk, “Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Kegiatan Perbankan”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 5 April 2021.

Situru, M. Rizal, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank yang Melanggar Sistem Prosedur dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Bidang Perbankan”, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 Maret-Juni 2014.

Sulistiyawan, Aditya Yuli, dkk, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 Oktober 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

D. Website

<http://www.critcim.org/redfeather/crime/005scorporate.html>

<https://m.liputan6.com/regional/read/4601267/mengenal-modus-kejahatan-perbankan-ala-3-petinggi-bank-riau>,